

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Lembar Telah Dilaksanakannya Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Peraturan Perundang-undangan.....	xv
Daftar Tabel.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu Hukum.....	12
1.3 Metode Penelitian.....	12
1.3.1 Tipe Penelitian.....	12
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.3.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
BAB II HAK POLITIK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	17
2.1 Konsepsi Hak Politik.....	17
2.1.1 Sejarah Hak Politik.....	18

2.1.2 Defini/Elemen Hak Politik.....	24
2.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Politik.....	25
2.1.4 Falsafah Hak Politik.....	32
2.1.5 Karakteristik Hak Politik.....	38
2.2 Kerangka Normatif Hak Politik.....	42
2.2.1 Hak Politik dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.....	43
a. <i>The Universal Declaration of Human Rights</i> (1948).....	43
b. <i>The International Covenant Civil and Political Rights</i> (1966).....	45
c. <i>Universal Declaration of Human Responsibility</i> (1997).....	46
d. <i>ASEAN Human Rights Declaration</i> (2012).....	49
2.2.2 Hak Politik dalam Konstitusi Indonesia.....	50
2.2.3 Hak Politik dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional.....	55
a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi.....	56
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	59
c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.....	60
d. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	62
e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.....	63
f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.....	64

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	65
BAB III PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	67
3.1 Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (<i>Extraordinary Crime</i>).....	67
3.1.1 Konsep Tindak Pidana Korupsi.....	68
3.1.2 Korupsi Politik (<i>Political Corruption</i>).....	72
3.1.3 Korupsi dan Kaitannya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	76
3.2 Pencabutan Hak Politik dalam Peraturan Perundang-undangan.....	79
3.3 Kedudukan Hakim dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	82
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: 10 Gubernur yang Terseret Korupsi.....	10
Tabel 2	: Kerugian Negara sampai Tahun 2014.....	77
Tabel 3	: Pembangunan Akses Transportasi antar Pulau.....	78

